



DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP KINERJA EKONOMI DAN KEMISKINAN

Oleh : Rusmiati^{1*}, Vovi Sinta², Turmudzi Basyir³, Eka Gustina⁴

rusmiati@stkipnurulhuda.ac.id

¹Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda

²Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda

³Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda

***Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi global tahun 2008. Selain itu, untuk menganalisis hubungan antara krisis ekonomi global dan kemiskinan. Pada awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada akhir proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung menurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kuantitatif dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil ini menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi tahun 1997, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,24%, selain itu, jumlah masyarakat miskin sedikit meningkat dari 21,5 miliar orang pada tahun 1996, menjadi 29,4 miliar orang pada tahun 1998. Pasca krisis ekonomi pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang baik senilai 7,1%. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik tidak diikuti dengan diseminasi pendapatan nasional. Simpulan dari penelitian ini yaitu mempertahankan momentum pemulihan ekonomi agar masalah-masalah sosial mendasar seperti pengangguran dan kemiskinan tidak semakin memburuk.*

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, Krisis Ekonomi

***Abstract-** This research aims to analyze the performance of the Indonesian economy after the 2008 global economic crisis. In addition, to analyze the relationship between the global economic crisis and poverty. At the beginning of the development process the poverty level tends to increase and at the end of the development process the poverty level tends to decrease. The method used in this research uses descriptive-quantitative analysis and is based on data from the Central Statistics Agency (BPS). These results show that after the 1997 economic crisis, the Indonesian economy experienced negative growth of 13.24%, in addition, the number of poor people increased slightly from 21.5 billion people in 1996, to 29.4 billion people in 1998. Post economic crisis in 2008, economic growth experienced a decline, even in 2010 economic growth experienced good growth of 7.1%. Good economic growth conditions are not accompanied by dissemination of national income. The conclusion of this research is to maintain the momentum of economic recovery so that fundamental social problems such as unemployment and poverty do not get worse.*

Keywords: Economic Growth, Income Distribution, Economic Crisis

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi menyerang negara-negara asia tenggara, beberapa kalangan percaya bahwa Indonesia tidak bernasib sama. Fundamental ekonomi Indonesia dipercaya cukup kuat menahan kejutekstral. Tapi kenyataannya guncangan keuangan yang sangat bebas berimbas kepada perekonomian Indonesia. Kekacuan dalam perekonomian ini menjadi awal dan salah satu penyebab runtuhnya perekonomian Indonesia termasuk terjebaknya Indonesia dalam penanaman modal dalam negeri. Selain faktor dari luar, salah satu penyebab krisis yang terjadi di Indonesia juga berasal dari dalam negeri, yaitu proses integrirasi perekonomian Indonesia ke dalam global yang berlangsung dengan cepat dan kelemahan fundamental mikro ekonomi.

Terjadinya krisis di Indonesia didahului krisis moneter di asia tenggara, telah merusak perekonomian negara. Penyebab utama krisis di negara-negara asia tenggara adalah ketimpangan neraca pembayaran internasional. Defisit *current account* ditutup dengan *surplus capital account*, terutama dengan modal yang bersifat jangka pendek, yang relative fluktuatif. Sehingga, apabila terjadi *rush* maka akan mengancam posisi cadangan devisa negara, yang akan mengakibatkan terjadinya turunya nilai mata uang nasional terhadap valuta asing. Hal ini menyebabkan beban pada uang luar negeri Indonesia, termasuk penanaman modal dalam negeri pemerintah.(Al- Maulidi, 2013)

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sebagai penjabaran

dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah diharapkan dapat memotivasi peningkatan kreativitas dan inisiatif untuk dapat lebih menggali dan mengembagkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, terarah, agar pembangunan di tiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerahnya (Nugroho, 2002)

Hakekat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan rakyat. Hal itu berarti menekankan perlunya pembangunan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada artinya keberhasilan pembangunan ekonomi yang tidak menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi perekonomian yang terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi tetap dapat terjaga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat ditunjukkan antara melalui peningkatan pendapatan perkapita beberapa kali lipat, menurunnya secara drastic jumlah penduduk miskin dan tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi rakyat.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni *effect trickle down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja

atau pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi *trickle-down* dari keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengangguran kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Siyoti & Sodik, 2015) Metode deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek dan subyek yang diteliti secara tepat dan sistematis, mengingat metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian memungkinkan untuk dilakukan hubungan antar variabel, mengembangkan generalisasi dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Dalam penelitian kuantitatif, data berupa bilangan, yakni menunjuk intensitas dan ekstensitas yang diperoleh dari hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jatuhnya pemerintah orde baru akibat krisis ekonomi 1997 menjadi pelajaran bagi pemerintah selanjutnya, sehingga krisis global tahun 2008 tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia tidak

mengalami penurunan yang cukup berarti seperti saat periode krisis ekonomi 1997, tahun 2008 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,02%, atau hanya turun sebesar 0,33% dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007. Kemampuan mengatasi krisis global tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia disbanding negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang yang jatuh akibat krisis global.

Indonesia justru mampu mencetaak pertumbuhan positif sebesar 4,5% pada tahun 2009, jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Dampak adanya krisis global ini justru baru dirasakan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,44%. Tahun 2010 kondisi perekonomian Indonesia kembali membaik dengan pertumbuhan sebesar 6,1%, meningkat dibandingkan tahun 2009 dan mampu lebih tinggi dari tahun 2008.

Kemampuan Indonesia bertahan terhadap krisis keuangan tersebut menimbulkan keyakinan rakyat pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun keberhasilan dalam bidang ekonomi pada tataran makro ini tidak mampu menekan tingkat kemiskinan yang sejak lama sudah berlangsung. Dalam Era Orde Baru dikenal kebijaksanaan peningkatan ekspor non-migas. Sub-sektor industri non migas ini menjadi prioritas utama. Hal ini selain untuk penghematan sumber daya alam yang tidak mudah

untuk diperbarui, juga dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat agar penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) berkurang. Berbagai fasilitas diberikan kepada calon investor asing, termasuk hak untuk membayar upah buruh rendah, sebagai keunggulan komparatif.

Peningkatan *output* manufaktur dalam sumbanganya terhadap PDB peran industri pengolahan dalam PDB mengalami kenaikan yang sangat berarti, dari 7,6% pada tahun 1973 menjadi hampir 25% pada tahun 1995%. Hal ini khususnya didorong oleh pertumbuhan ekspor produk-produk olahan seperti garment (pakaian jadi), produk kain dan alas kaki, barang-barang elektronik dan kayu lapis. Ekspor non-migas, yang kini telah menjadi bagian terbesar dari produk industri pengolahan kita, mengalami kenaikan sekitar 22% setiap tahunnya selama satu dekade penuh, yaitu sejak tahun 1985 ketika deregulasi diberlakukan untuk pertama kalinya sampai drengan tahun 1995, dan kenaikan ini adalah empat kali lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata kenaikan perdagangan dunia (Stem, 2000)

Berbagai kajian yang menelaah krisis keuangan Asia telah banyak dilakukan, dari berbagai sudut pandang. Secara umum terlihat suatu karakteristik yang berlaku sama di seluruh negara yang dilanda krisis. Namun, dalam hal ini kedalamannya dan jangka waktunya, Indonesia dapat dikatakan sangat unik. Sulit mencari perbandinganya, barangkali negara yang paling layak untuk dibandingkan adalah Rusia, dan sekarang mungkin Argentina. Oleh

karena itu, dalam uraian secara singkat krisis di Indonesia begitu parah, dan pemulihannya begitu lambat (Kartasasmita, 2001)

Dalam perdebatan akademis selama ini mengenai hubungan antara pertumbuhan dan penurunan kemiskinan, apakah pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin. Dalam akhir 1990-an, “pertumbuhan yang pro miskin” (PPG) ini menjadi terkenal saat ekonomi banyak memulai menganalisis paket kebijakan yang dapat mencapai penurunan kemiskinan yang lebih cepat lewat pertumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan. PPG secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan yang signifikan. Dalam usaha memberikan relevansi analisis dan operasional terhadap konsep tersebut, di dalam literature muncul dua pendekatan. Pendekatan pertama memfokuskan pada keyakinan bahwa orang miskin pasti mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi walaupun tidak porposional. Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin jika di samakan dengan suatu pengurangan kesenjangan atau dalam perkataan lain, pangsa pendapatan dari kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini disebut juga definisi relatif dari PPG. Walaupun secara intuisi menarik, pendekatan atau definisi ini terbatas, terutama saat diterapkan didalam suatu konteks operasional. Dalam definisi PPG ini, pertumbuhan bisa mengurangi kesenjangan. Namun, dengan

memfokuskan terlalu berat pada kesenjangan, suatu paket kebijakan bisa mengakibatkan hasil yang suboptimal bagi kedua kelompok rumah tangga miskin dan non-miskin, atau laju penurunan kemiskinan bisa lebih kecil (Word Bank, 2005)

KESIMPULAN

Pasca krisis tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan namun pada tahun 2010 kondisi ekonomi nasional menunjukkan kondisi yang membaik dengan jumlah pertumbuhan mencapai 7,1%. Kondisi yang membaik pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti pada pemerataan dalam distribusi pendapatan nasional yang menunjukkan semakin lebar kesenjangan ekonomi di Indonesia yang di tandai dengan naiknya presentase dari 0,345 pada tahun 2006 menjadi 0,39 pada tahun 2010.

Oleh karena itu, upaya untuk melaksanakan pemerataan hasil pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerataan berarti suatu pembagian hasil produksi kepada masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya. Untuk mewujudkan pemerataan ini, pemerintah Indonesia menerapkan delapan jalur pemerataan, yaitu: Pemerataan kebutuhan pokok rakyat, Pendidikan pembagian pendapatan melalui usaha-usaha pada karya, Kesempatan kerja, Pengembangan usaha, Kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda, Penyebaran penduduk melalui transmigrasi atau pengembangan wilayah dan pemerataan dalam memperoleh keadilan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, diantaranya yaitu Prodi Pendidikan Ekonomi dan Editor Incief *Jurnal of Economic Education and Eco-Technopreneurship* (JECO) UNUHA. Penulis menyadari banyak sekali kesalahan dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih atas ketidak sempurnaan yang terjadi dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Maulidi. (2013). *Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Utang Luar*. 72, 364–374.
- Kartasasmita. (2001). *Peningkatan Output Manufaktur*. 1–23.
- Nugroho. (2002). Model Ekonomi Basis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 1(1), 23–30.
- Siyoti, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media.
- Stem. (2000). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 302–313.
- Word Bank. (2005). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>